

## ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM Mendukung KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

M Irham Ardiansyah S<sup>1</sup>, Annisa Khairiah<sup>2</sup>, Ariyanta Maulana Sitepu<sup>3</sup>, Morina Simanjourang<sup>4</sup>, Galih Supraja<sup>5</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

[ardiansyahirham54@gmail.com](mailto:ardiansyahirham54@gmail.com)<sup>1</sup>, [anisakhriah05@gmail.com](mailto:anisakhriah05@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sitepuariyanta1@gmail.com](mailto:sitepuariyanta1@gmail.com)<sup>3</sup>, [morinasimanjourang@gmail.com](mailto:morinasimanjourang@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[lazarszidane@gmail.com](mailto:lazarszidane@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Governance* dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah melalui hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menganalisis dan mengkaji studi literatur dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui situs web google scholar. Pada pembahasan penelitian ini terdapat sebelas hasil dari sebelas jurnal penelitian terdahulu yang dianalisis dengan hasil terdapat delapan penelitian yang menyatakan penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dua penelitian yang menyatakan penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan satu penelitian menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Laporan Keuangan, Kualitas.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Good Governance in supporting the quality of government financial reports through the results of several previous studies. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach by analyzing and reviewing literature studies from several previous studies, this study uses secondary data by collecting data and results of previous studies related to the implementation of Good Governance on the quality of government financial reports through the Google Scholar website. In the discussion of this study, there are eleven results from eleven previous research journals that were analyzed with the results that there are eight studies that state that the implementation of Good Governance has a positive effect on the quality of government financial reports, two studies that state that*

*the implementation of Good Governance does not have a positive effect on the quality of government financial reports, and one study states that the implementation of Good Governance has a positive but not significant effect on the quality of government financial reports. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of Good Governance has a positive effect in supporting the quality of government financial reports.*

**Keywords:** Good Governance, Financial Report, Quality

## 1. Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, masyarakat semakin menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi publik, transparansi, responsivitas, dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip good governance sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, prinsip ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan baik. Prinsip good governance berfungsi sebagai pengendali bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan menghindari praktik korupsi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kadang-kadang melakukan tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan masalah, baik secara sengaja maupun tidak. Ketika kepala daerah mengambil keputusan tertentu, seringkali muncul kasus tindak korupsi yang mungkin terjadi tanpa disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurut ketentuan umum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, laporan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dengan demikian, diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatannya maupun dalam pengelolaan belanja anggaran.

Laporan keuangan merupakan laporan Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dapat diukur berdasarkan integritas dalam penyusunannya. Penyusunan laporan keuangan yang mempunyai nilai integritas bertujuan untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan bisa mengetahui situasi Perusahaan atau instansi yang sebenarnya bukan laporan keuangan yang dimanipulasi dan tidak teratur. Selain dari itu, melalui laporan keuangan yang memiliki nilai integritas tinggi dapat membantu para pemangku

kepentingan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Investasi.

Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan transparan menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi dan sosial. Konsep *Good Governance* memperkuat prinsi-prinsip seperti akuntabilitas partisipasi masyarakat dan keadilan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat mempengaruhi kepercayaan publik dan investor. Oleh karena itu, penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang optimal.

Kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik, investor dan lembaga internasional. Oleh karena itu, penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang optimal, memperkuat kepercayaan publik dan mendukung Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan yang transparan bagi masyarakat bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada unit organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan berfungsi untuk menilai apakah dana tersebut digunakan dengan tepat dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Di sisi lain, evaluasi sangat penting untuk melakukan perbaikan pada agenda di tahun-tahun mendatang dan untuk memastikan bahwa hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, masih terdapat tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu, analisis penerapan *good governance* dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara *good governance* dan kualitas laporan keuangan serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Pengertian Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Pemilik perusahaan yaitu principal selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana yang di investasikan dalam Perusahaan” (Eka Putri, 2017).

## **2.2. Pengertian *Good Governance***

*Good Governance* yang memiliki arti pemerintah yang baik. *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam mewujudkan konsep *good governance* maka sangat dibutuhkan partisipasi antara tiga komponen yaitu pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil (Nurhidayat, 2023). Menurut *United Nations Development Programs (UNDP)* *Good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Sedangkan Menurut (Gunawan, 2021) *Good governance* merupakan pendekatan manajemen secara menyeluruh dimana para petinggi dalam organisasi mengarahkan dan mengontrol seluruh organisasi, memanfaatkan kombinasi informasi manajemen dan struktur pengendalian manajemen yang hierarkis. Kegiatan *good governance* menjamin bahwa informasi manajemen kritis yang mencapai tim eksekutif cukup lengkap, akurat dan *On Time* untuk memungkinkan pengambilan keputusan manajemen yang tepat, dan memberikan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa Langkah-langkah, arah dan instruksi dari manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif.

Menurut (Indah Nuraina Achmad & Teknologi, 2022) *Good governance* memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- a. Terbentuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.
- b. Adanya keharusan untuk selalu menyajikan informasi secara transparan, dan mempunyai daya tanggap yang tinggi dalam pelayanan atau menerima saran dan kritik masyarakat ataupun lainnya.
- c. Sumber daya digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata kelola pemerintah yang baik.

- e. Memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat yang dinilai lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya Pembangunan.

Prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) adalah faktor utama dalam mewujudkan sistem yang lebih baik, penelitian yang dilakukan (Nurhidayat, 2023) menyajikan enam prinsip tata pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu :]

- a. Akuntabilitas: merupakan setiap bentuk aktivitas yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Transparansi: merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya berkaitan dengan keuangan.
- c. Penegakan Hukum: merupakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
- d. Kesetaraan: prinsip kesetaraan akan memacu tempatt keadilan dan Pembangunan ekonomi yang stabil, karena seluruh masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- e. Daya Tanggap: dengan prinsip daya tanggap yang maksimal kepada seluruh masyarakat maka akan muncul rasa kepuasan tersendiri bagi masyarakat tersebut.
- f. Efektifitas dan Efisiensi: merupakan ukuran suatu organisasi dalam menyelesaikan tahap pekerjaan yang lebih baik dalam penyelesaian tugas.

### 2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kualitas dapat diartikan dengan tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) dan mutu. Sedangkan dalam dunia akuntansi, kualitas merupakan hubungan dengan informasi akuntansi yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara teratur yang menjelaskan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, sisa anggaran yang berlebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu organisasi dalam pelaporan yang berguna untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (FITRA, 2019). Laporan keuangan

merupakan pada dasarnya merupakan hasil dari tahap akuntansi yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau pergerakan suatu Perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2023). Menurut (Press & Media, 2017) Laporan keuangan atau *Financial Statement* secara umum terdiri dari *Neraca*, *Income statement*, laporan *cash flows* dan catatan tambahan (*Footnotes*) adalah untuk mengetahui nilai kondisi keuangan, tingkat keuntungan, dan perputaran arus kas secara menyeluruh, sehingga pengguna dapat memahami keadaan perusahaan dengan mencermati dan laporan keuangan yang lainnya.

Menurut (Dr. Darmawan, 2020) dalam laporan keuangan, terdapat empat jenis utama dalam laporan keuangan yaitu:

- a. Pernyataan Posisi Keuangan (Neraca) : merupakan informasi laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu organisasi pada periode tertentu. Neraca terdiri atas tiga bagian yaitu:
  - 1) Aset: yaitu sesuatu kekayaan yang dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mana memberikan kegunaan dalam ekonomi dimasa akan datang dan diharapkan dapat diperoleh organisasi.
  - 2) Kewajiban: yaitu sesuatu yang dimiliki bisnis kepada seseorang seperti kreditur, pinjaman bank, dll
  - 3) Ekuitas: yaitu hak residual atas asset organisasi setelah dikurangi dengan liabilitas.
- b. Laporan Penghasilan (Laporan Laba Rugi) : merupakan informasi laporan keuangan yang menyajikan kinerja keuangan dalam hal laba atau rugi bersih selama periode tertentu. Laporan laba rugi terbagi atas dua bagian yaitu:
  - 1) Penghasilan: yaitu pendapatan yang diperoleh selama suatu periode tertentu seperti pendapatan penjualan, pendapatan dividen, dll.
  - 2) Biaya: Pengeluaran yang dikeluarkan selama suatu periode tertentu seperti biaya gaji dan upah, biaya sewa, dll.
- c. Laporan Arus Kas : merupakan informasi laporan keuangan yang menyajikan pergerakan uang tunai dan saldo di bank dalam satu periode tertentu atau laporan yang menyajikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu organisasi selama satu periode tertentu.
- d. Pernyataan Perubahan Ekuitas (Laba Ditahan) : merupakan informasi laporan keuangan yang menyajikan tentang perubahan ekuitas pemilik dalam satu periode tertentu. Perubahan ekuitas pemilik berasal dari sumber-sumber seperti laba rugi, modal saham, pembayaran bagi hasil, keuntungan atau kerugian, dan kebijakan akuntansi.

Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang disajikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dan keuangan negara. Menurut (FITRA, 2019) tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a. Menyajikan informasi tentang posisi dan perubahan dalam perekonomian, hutang, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan perekonomian.
- c. Menyajikan informasi tentang kepatuhan realisasi terhadap anggarannya.
- d. Menyajikan informasi tentang cara pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyajikan informasi tentang potensi pemerintah untuk membiayai pelayanan publik.
- f. Menyajikan informasi yang bermanfaat untuk evaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut (Fitri et al., 2023) Pemerintah menggunakan dua basis dalam menyajikan informasi laporan keuangan yaitu basis kas dan basis akrual. Untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui bahwa pemerintah menggunakan basis kas. Sedangkan dalam pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas diakui bahwa pemerintah menggunakan basis akrual.

Menurut (Rumbiak, 2019) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas akan melindungi hak-hak pengambil keputusan, karena mereka dapat mengetahui keadaan entitas yang sebenarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Relevan : merupakan konsep laporan keuangan yang dinyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan saling terhubung dan dapat mempengaruhi keputusan informasi akuntansi yang terkait dapat membantu penggunaannya dalam mengevaluasi kejadian masa lampau atau saat ini, memprediksi masa yang akan datang, mengesahkan atau pemeriksaan ulang di masa lampau.

- b. Andal : merupakan konsep laporan keuangan yang dinyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan secara material dan definisi yang tidak benar.
- c. Dapat dibandingkan : merupakan konsep laporan keuangan yang dinyatakan bahwa informasi laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antar periode atau antar entitas
- d. Dapat dipahami : merupakan konsep laporan keuangan yang dinyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan mudah dimengerti oleh penggunanya (Indonesia, 2010).

### Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dalam mendukung *Good Governance*.

No.	Author (Tahun)	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1.	(Herawati & Nopianti, 2017)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</li> </ul>	<i>Good Governance</i> memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Akuntansi Pemerintah</li> </ul>
2.	(Purnomo & Handayani, 2019a)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:	<i>Good Governance</i> memberikan	Variabel X:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Good Governance</i>, dan <i>e-government</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Surabaya.</li> </ul>	<p>pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Sumber Daya Manusia</li> <li>• <i>e-government</i></li> </ul>
3.	(Azlim & Bakar, 2012)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.</li> <li>• Secara simultan penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.</li> </ul>	<p><i>Good Governance</i> memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</p>	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Akuntansi Pemerintah</li> </ul>
4.	(Sinaga & Hidayat, 2017)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan</li> </ul>	<p><i>Good Governance</i> memberikan pengaruh positif terhadap kualitas</p>	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pengendalian Internal</li> </ul>

		Keuangan, dan penerapan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	laporan keuangan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Laporan Keuangan</li> </ul>
5.	(Masitoh et al., 2020)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial penerapan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten.</li> </ul>	<i>Good Governance</i> memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Sumber Daya Manusia</li> </ul>
6.	(Agatha et al., 2020)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan penerapan <i>Good Governance</i></li> </ul>	<i>Good Governance</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Sumber Daya Manusia</li> <li>• Standar Akuntansi Pemerintah</li> </ul>

		<p>berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan penerapan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</li> </ul>		
7.	(Agung & Mulyani, 2020)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial penerapan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Latar Belakang Profesi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</li> <li>• Secara simultan penerapan <i>Good Governance</i> dan Latar Belakang</li> </ul>	<p><i>Good Governance</i> memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah</p>	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar Belakang Profesi</li> </ul>

		Profesi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.		
8.	(AgustiningTyas et al., 2020)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial penerapan <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</li> <li>• Secara simultan penerapan <i>Good Governance</i>, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya</li> </ul>	<i>Good Governance</i> memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</li> <li>• Kompetensi Sumber Daya Manusia</li> </ul>

		Manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.		
9.	(Winarni et al., 2020a)	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial penerapan <i>Good Governance</i>, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi. Sedangkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi.</li> </ul>	<i>Good Governance</i> memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	<p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Sumber Daya Manusia</li> <li>• Standar Akuntansi Pemerintah</li> <li>• Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</li> <li>• Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>
10.	(Rachmawati & Anik, 2020a)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:	<i>Good Governance</i> memberikan	Variabel X:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan dalam penerapan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</li> </ul>	<p>pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Akuntansi Pemerintah</li> <li>• Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah</li> </ul>
--	--	--	---	---

### 3. Metode Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Berdasarkan teori maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa penelitian terdahulu (*Literatur Riview*) yang berhubungan dengan penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil beberapa jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian melalui database situs web Google Scholar.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Agustining Tyas et al., 2020) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Hal ini dibuktikan dengan menunjukkan hasil uji t hitung *good governance* sebesar  $3.398 < 14.289$  dan sig  $0.001 < 0.05$ . hal ini didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Purnomo & Handayani, 2019) yang mengakui bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan bukti melalui perolehan hasil dari analisis sebesar 0,303, yang diakui bahwa dengan penerapan *Good Governance* yang meningkat, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat sebesar 0,303. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dijalankan oleh (Aminy et al., 2021) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh dalam penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t-statistik dengan hasil  $1,032 < 1,96$  (t-tabel) sehingga penerapan *Good Governance* dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada satuan kerja KPU Provinsi dan KPU kota/kabupaten Nusa Tenggara Barat.

Menurut penelitian yang dijalankan oleh (Azlim et al., 2012) dengan melakukan uji-t dengan menganalisis hasil koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel independen. Hasil luaran SPSS menghasilkan bahwa hasil ( $\beta$ ) untuk penerapan *Good Governance* adalah 0,122. Sehingga penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Aceh. Penelitian yang dilaksanakan (Winarni et al., 2020) mengemukakan penelitiannya yang menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi dengan membuktikan melalui hasil uji t-statistik sebesar  $2.167 > 1.96$  dengan hasil koefisien penerapan *Good Governance* berjumlah 0.386, sehingga penelitian ini menyatakan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang sudah dijalankan (Yuntina & Arifin, 2024) membuktikan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dibuktikan melalui hasil hipotesis yang menunjukkan signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ , dengan hasil ini maka penerapan *Good Governance* yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Akan tetapi dalam penelitian yang dijalankan (Rachmawati & Anik, 2020) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang. Hal ini mengarahkan bahwa *Good Governance* memberikan pengaruh yang sangat minim dalam kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Junyantara & Putra, 2021) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan dari uji t yang mengemukakan bahwa nilai koefisien parameter berjumlah 0,497 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , dengan hasil ini maka dengan baiknya penerapan *Good Governance* pada lembaga pemerintah daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik, hal ini dikarenakan adanya tuntutan kepada pihak berwenang pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih baik dalam responabilitas, transparansi dan akuntabilitas serta memahami kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih berkualitas. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2022) berdasarkan hasil yang ditemukan, penerapan *Good Governance* tidak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batang. Temuan ini dibuktikan dengan hasil perhitungan dari uji t statistik sebesar  $0,094 > 0,05$  dengan hasil ini dapat membuktikan bahwa hubungan antara penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Batang masih kurang mengimplementasikan transparansi pada informasi keuangan maupun non keuangan yang mana implementasi transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*, kurangnya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pelayanan publik pada instansi pemerintah untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan dan pelayanan kepada media pers, dan kurangnya memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Pada penelitian yang dilaksanakan (Tabupook & Wulandari, 2024) yang menyatakan penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan membuktikan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa dalam penerapan *Good Governance* pada suatu instansi akan memberikan dampak terhadap *Output* laporan yang mendeskripsikan penggunaan anggaran yang akan dihasilkan menjadi lebih akuntabel dan transparansi. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Advia et al., 2022) menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palangkaraya. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai hitung berjumlah  $4,684 > t$  tabel sebesar 1,997 dan hasil nilai sig. penelitian  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan adanya pengaruh signifikan antara variabel (X) penerapan *Good*

*Governance* dengan variabel (Y) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palangkaraya. Hal ini dikarenakan instansi mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan anggaran sehingga laporan keuangan yang sudah disajikan bersifat netral (tidak ada pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan).

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penelitian ini mengkaji sebelas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
- b. Berdasarkan pembahasan diatas terdapat delapan penelitian yang mendukung dengan menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dikarenakan dalam penerapan *Good Governance* pada suatu instansi akan memberikan dampak terhadap *Output* laporan yang mendeskripsikan penggunaan anggaran yang akan dihasilkan menjadi lebih akuntabel dan transparansi.
- c. Berdasarkan pembahasan diatas terdapat dua penelitian yang tidak mendukung dengan menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dikarenakan kurang mengimplementasikan transparansi pada informasi keuangan maupun non keuangan yang mana implementasi transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*, dan tidak maksimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada satuan kerja.
- d. Berdasarkan pembahasan diatas terdapat satu penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Hal ini mengarahkan bahwa *Good Governance* memberikan pengaruh yang sangat minim dalam kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan pembahasan diatas dari sebelas penelitian, terdapat penelitian terdahulu yang mendominasi dengan menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh dalam mendukung laporan kualitas laporan keuangan pemerintah.

## 6. Daftar Pustaka

Advia, R., Wibowo, A. S., & Diarsyad, M. I. (2022). PENGARUH PENERAPAN

- STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–10.
- Agatha, K. V., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(07).
- Agung, M. F., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh Good Governance dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 142–159.
- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan:(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Se-Nusa Tenggara Barat). *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147.
- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 164.
- Azlim, Darwanis, & Bakar, U. abu. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 1–14. [www.analisadaily.com](http://www.analisadaily.com)
- Dr. Darmawan, M. A. B. (2020). *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. UNY Press. <https://books.google.co.id/books?id=oggREAAAQBAJ>
- Eka Putri, R. (2017). Pengaruh Tenur, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 2017.
- FITRA, H. (2019). *ANALISIS NERACA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH*. IRDH Book Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=zsXODwAAQBAJ>
- Fitri, A., Pangestu, H., Hasanah, K., Fitriana, N., Febri, J. H., Purnanda, M., Berliana, L. P., Arsyad, M., Pratama, A. A., & Susanti, E. E. (2023). *Akuntansi*

- Pemerintahan di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.  
<https://books.google.co.id/books?id=8-LEAAQBAJ>
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance) - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.  
<https://books.google.co.id/books?id=NNgaEAAQBAJ>
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal STAR*, 14(2), 10–45.
- Hery, S. E. M. S. C. R. P. R. S. A. (2023). *Analisis Laporan Keuangan : Intergrated and comperhesive edition*. Gramedia Widiasarana Indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=cFkjEAAQBAJ>
- Indah Nuraina Achmad, S. H. M. M., & Teknologi, M. M. (2022). *Mengenal Karakteristik Good Governance melalui Model Discovery Learning*. Mikro Media Teknologi.  
<https://books.google.co.id/books?id=G8-nEAAQBAJ>
- Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.
- Junyantara, I. G. A., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 338–358.
- Masitoh, S., Tullah, D. S., & Apriyanti, E. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2), 18–26.
- Nurhidayat, I. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Press, U. B., & Media, U. B. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=DjBODwAAQBAJ>
- Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019a). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019b). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–20.
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020a). “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah , Good Governance Dan

- Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ” ( Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1389–1407. [lppm-unissula.com](http://lppm-unissula.com)
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020b). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Rumbiak, K. (2019). *PENGARUH KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2018)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1).
- Sinaga, M., & Hidayat, O. K. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, dan Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Mediasi*, 6(01), 89–100.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tabupook, A. A., & Wulandari, I. (2024). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 2395–2407.
- Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020a). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 289–295.
- Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020b). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197>
- Yuntina, S. S., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 859–871.

